

## **ABSTRAK**

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggaungkan kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS berbasis risiko yaitu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) berupa perizinan tunggal sebagai legalitas. Namun, tidak sedikit pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mengetahui kelanjutan kegiatan usaha setelah mendapatkan legalitas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif menggunakan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaku usaha wajib memiliki legalitas berupa NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Terbitnya NIB menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait cipta kerja yang perlu diketahui, dipahami, dan dipenuhi oleh pelaku usaha khususnya usaha mikro dan usaha kecil guna mengembangkan dan memajukan usaha. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha juga perlu diketahui agar terhindar dari penjatuhan sanksi.

**Kata kunci: Legalitas, Usaha Mikro dan Kecil, OSS Indonesia**

## **ABSTRACT**

*Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Cipta Kerja stipulates the ease of business licensing for micro and small businesses by simplifying licensing through the risk-based Approached OSS (Online Single Submission) system, namely issuing a Business Identification Number (NIB) in the form of a single license as legality. However, not a few micro and small business owners are not aware of the continuation of business activities after obtaining the legality.*

*The research method being used is juridical-normative through library study method, which is collected by secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is also a qualitative research based with analytical descriptive method.*

*Based on the research results, business owners are required to have legality in the form of an NIB issued by the OSS institution. The issuance of NIB gives result in rights and obligations as stipulated in the laws and regulations in Indonesia regarding Cipta Kerja which need to be known, understood and fulfilled by business owners, especially micro and small businesses in order to develop and advance their businesses. Supervision of the implementation of business activities also needs to be known in order to avoid imposition of sanctions.*

**Keywords: Legality, Micro and Small Enterprises, OSS Indonesia**